



## GERAKAN MASYARAKAT TERHADAP DAMPAK KEBOCORAN MINYAK PERTAMINA (STUDI PADA DESA TALANG BALAI KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM)

Mutmainnah<sup>1</sup> Norma Juainah<sup>2</sup> Dumyati<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

[mutmainnahimut2003@gmail.com](mailto:mutmainnahimut2003@gmail.com)<sup>1</sup> [normajuainah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:normajuainah_uin@radenfatah.ac.id)<sup>2</sup>

[azza.dum@gmail.com](mailto:azza.dum@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract (English)

This study discusses the community movement in response to the impact of the Pertamina oil spill in Talang Balai Village, Belida Darat Sub-district, Muara Enim Regency. The oil spill, which occurred on September 25, 2024 due to a broken Pertamina pipeline, caused soil, water, and air pollution, thereby threatening the economic livelihoods and health of the local population. Residents, who predominantly work as farmers and fishermen, lost their sources of income due to the death of fish in the river and the damage to rubber and pineapple plantations. This research employs a qualitative approach with observation, interview, and documentation techniques. The findings show that the community movement emerged as a response to environmental damage that brought collective suffering. However, the effectiveness of this movement is hindered by the lack of information transparency from both the company and the government, as well as the limited budget of local government to address environmental pollution. In the context of James C. Scott's theory, the resistance of Talang Balai villagers evolved from everyday forms of resistance, such as self-documentation and informal communication, into a public transcript manifested in demonstrations at the South Sumatra Governor's Office. This movement not only demands compensation, but also environmental justice and the recognition of their rights as citizens. This study emphasizes the importance of information transparency, strict enforcement of environmental regulations, and the fulfillment of corporate and government responsibilities to ensure the sustainability of life for affected communities.

### Article History

*Submitted: 21 Juli 2025*

*Accepted: 24 Juli 2025*

*Published: 25 Juli 2025*

### Key Words

Community movement, oil spill, Pertamina, resistance, James C. Scott

### Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini membahas gerakan masyarakat terhadap dampak kebocoran minyak Pertamina di Desa Talang Balai, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim. Kebocoran minyak yang terjadi pada 25 September 2024 akibat patahnya pipa penyalur Pertamina menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara, sehingga mengancam kehidupan ekonomi dan kesehatan masyarakat setempat. Penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan kehilangan mata pencaharian akibat matinya ikan di sungai serta rusaknya tanaman perkebunan karet dan nanas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan masyarakat muncul sebagai respons atas kerusakan lingkungan yang menimbulkan penderitaan kolektif. Namun, efektivitas gerakan ini dihambat oleh kurangnya keterbukaan informasi dari pihak perusahaan dan pemerintah, serta keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menangani pencemaran lingkungan. Dalam konteks teori James C. Scott, perlawanan masyarakat Desa Talang Balai berkembang dari everyday forms of resistance seperti pendokumentasian mandiri dan komunikasi informal, menjadi public transcript berupa aksi demonstrasi di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya transparansi informasi, penegakan regulasi

### Sejarah Artikel

*Submitted: 21 Juli 2025*

*Accepted: 24 Juli 2025*

*Published: 25 Juli 2025*

### Kata Kunci

Gerakan masyarakat, kebocoran minyak, Pertamina, perlawanan, James C. Scott





---

lingkungan yang tegas, serta pemenuhan tanggung jawab perusahaan dan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan hidup masyarakat terdampak.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia masih mengandalkan minyak bumi sebagai sumber energi utamanya. Beragam aktivitas masyarakat sehari-hari hampir selalu berkaitan dengan produk turunan minyak bumi, seperti Liquefied Petroleum Gases (LPG), bensin, avtur, solar, pelumas, aspal, kerosin, dan lainnya (Rahmayanti et al., 2021). Provinsi Sumatera Selatan sendiri terletak pada 10 37' 27'' hingga 40 55' 17'' Lintang Selatan dan 102o 3' 54'' hingga 106o 13' 26'' Bujur Timur. Wilayah ini memiliki banyak sungai besar dan kecil serta kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, batubara, dan gas alam (Bappeda, 2020). Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi penghasil minyak dan gas di Indonesia. Kabupaten Muara Enim, yang berada di provinsi ini, dikenal memiliki aktivitas eksplorasi minyak yang cukup intensif. Kendati kehadiran sumber daya alam tersebut memberi kontribusi bagi pendapatan daerah, aktivitas eksplorasi kerap menimbulkan dampak negatif seperti kebocoran minyak yang membahayakan kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Pencemaran yang terjadi diakibatkan oleh tumpahan minyak menjadi persoalan serius karena mengancam ekosistem sungai dan masyarakat di sekitarnya. Proses pembersihan minyak tumpah ini pun tidak mudah dilakukan, dan dampak yang ditimbulkan sering kali memerlukan waktu lama untuk terlihat (Lex Suprema et al., 2021). Kecamatan Belida Darat, yang berada di Kabupaten Muara Enim, umumnya memiliki karakteristik pedesaan dengan mata pencaharian mayoritas penduduknya sebagai petani, pekebun, serta pelaku usaha berbasis sumber daya alam. Desa Talang Balai di kecamatan ini memiliki keunikan tersendiri terkait adat istiadat, tradisi, dan potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk memajukan desa.

Di Belida Darat, terdapat fasilitas milik PT Pertamina, termasuk di Desa Talang Balai. Minyak bumi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Namun, saat ini terjadi kebocoran minyak yang berdampak merugikan warga, termasuk di Desa Talang Balai. Kebocoran ini terjadi pada 25 September 2024 akibat pipa penyalur minyak yang patah. Desa Benuang, Tanjung 3, dan Sialing menjadi wilayah terdampak. Awalnya pihak Pertamina tidak menyadari adanya kerusakan tersebut hingga warga melaporkannya langsung. Kebocoran ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menimbulkan kerugian bagi Pertamina sendiri. Secara ekologis, tumpahan minyak di sepanjang aliran sungai Desa Talang Balai menyebabkan matinya ikan-ikan yang menjadi sumber pangan utama masyarakat setempat serta menghilangnya hewan-hewan di sekitar sungai. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dampak pencemaran akibat kebocoran minyak Pertamina dapat dilihat secara fisik dan biologis. Secara fisik, tumpahan minyak tampak jelas di permukaan sungai tanpa memerlukan alat bantu, sedangkan secara biologis tumpahan tersebut mengancam ekosistem baik di perairan maupun daratan. Oleh karena itu, pencemaran semacam ini harus diminimalkan (Amelia, 2022). Selain itu, lahan perkebunan karet milik warga juga turut terdampak. Minyak yang meresap ke dalam tanah hingga akar karet menimbulkan kerusakan dan penurunan harga jual karet, sehingga perekonomian masyarakat terancam. Sebagai bentuk tanggung jawab, masyarakat melalui gerakan Barisan Masyarakat Gelumbang Raya Bersatu (BM-GRB) mengajukan gugatan atas kebocoran minyak tersebut. Mereka memanfaatkan payung hukum lingkungan untuk melakukan gugatan



perdata, meskipun sering kali masyarakat kesulitan memperoleh informasi pasti mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.

Dikutip dari Rmolsumsel (Deni Pratama, November 2024), ratusan warga Kecamatan Belida Darat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Selatan menuntut pertanggungjawaban Pertamina atas pencemaran lingkungan dan kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Dalam aksi tersebut, masyarakat menyampaikan lima tuntutan, yaitu penghentian eksploitasi sumber daya alam di Kecamatan Belida Darat, pembentukan tim terpadu untuk menilai kerusakan lingkungan, pemberian beasiswa S1 bagi anak-anak asal Belida Darat, serta penyelenggaraan operasi pasar murah di wilayah mereka.

Meski Pertamina memiliki kewajiban untuk melakukan pemulihan dan rehabilitasi lingkungan pasca insiden, upaya yang dilakukan hanya sebatas pemulihan fisik di lokasi tertentu sehingga masyarakat menilai belum ada pemulihan menyeluruh di kebun dan sungai sekitar. Minimnya informasi mengenai langkah-langkah yang diambil perusahaan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Dalam kerangka regulasi, pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) secara tegas mengatur sanksi bagi pencemaran lingkungan dan mewajibkan adanya tindakan pemulihan melibatkan perusahaan serta pemerintah. Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menilai penting untuk mengkaji secara mendalam gerakan masyarakat atas dampak kebocoran minyak Pertamina dengan studi pada Desa Talang Balai, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, yakni untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran atas permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini digunakan metode studi lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memahami secara langsung berbagai literatur, buku, catatan, serta laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2018), bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian sehingga sangat sesuai digunakan untuk mengkaji sikap, perilaku, persepsi, maupun tindakan subjek.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, RT, serta masyarakat setempat yang berada di Desa Talang Balai. Data primer ini menjadi data utama dalam penelitian untuk menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber pendukung seperti dokumentasi dan literatur. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari kajian literatur, artikel, berita, serta jurnal ilmiah yang ditulis oleh para ahli dan peneliti sebelumnya, sehingga data yang diperoleh bersifat ilmiah, akurat, dan dapat diandalkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara beragam untuk memperoleh informasi yang valid dan sesuai dengan realitas di lapangan. Teknik yang digunakan meliputi observasi,



wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, yaitu dampak kebocoran minyak Pertamina di Desa Talang Balai Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, termasuk mendatangi warga setempat untuk menggali informasi terkait masalah penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dengan informan penelitian untuk menggali data secara mendalam menggunakan pertanyaan terbuka, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai topik yang diteliti. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau dokumen lain yang relevan dengan penelitian, yang dalam hal ini diperoleh dari Desa Talang Balai Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Talang Balai Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan hasil survei dan observasi yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah dikumpulkan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, dengan cara menjelaskan dan menggambarkan temuan-temuan di lapangan melalui proses observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gerakan Masyarakat Terhadap Dampak Kebocoran Minyak Pertamina Desa Talang Balai

Perlawanan, menurut James C. Scott, merupakan suatu tindakan yang dalam pelaksanaannya tidak selalu membutuhkan pengorbanan besar, baik secara individu maupun kolektif, dalam jangka pendek maupun panjang. Kerugian yang dialami, seperti dalam bentuk pemogokan, pemboikotan, atau penolakan kerja, dilihat sebagai pengorbanan sementara demi memperoleh keuntungan di masa mendatang. Tindakan seperti ini disebut sebagai kerelaan rutin, yakni strategi yang lahir dari ketidakberdayaan dalam menghadapi kelas dominan. Perlawanan pada dasarnya muncul dari kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustrasi, dan menghadapi situasi ketidakadilan. Ketika ketidakadilan dan rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, maka akan muncul gerakan sosial yang mampu mengubah kondisi sosial, politik, dan ekonomi menjadi berbeda dari sebelumnya.

Insiden kebocoran minyak di Desa Talang Balai akibat aktivitas operasional Pertamina menimbulkan dampak besar bagi masyarakat setempat. Penduduk desa yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak menghadapi kerugian akibat tercemarnya sungai, menurunnya hasil tangkapan ikan, serta rusaknya ekosistem perairan yang selama ini menopang kehidupan mereka. Sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan kini justru menimbulkan masalah baru. Tumpahan minyak di permukaan air memunculkan bau menyengat, mematikan ikan-ikan, serta merusak keseimbangan ekosistem. Petani tambak mengalami kerugian karena air tercemar masuk ke kolam mereka, menghentikan produksi dan menghilangkan mata pencaharian utama. Selain kerugian ekonomi, dampak kesehatan pun mulai dirasakan warga, seperti sakit kepala, iritasi kulit, dan gangguan pernapasan akibat paparan langsung maupun tidak langsung limbah minyak. Air sumur tercemar sehingga sulit diakses untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan anak-anak dilarang bermain di sekitar sungai karena kekhawatiran akan dampak kesehatannya.

Dari sisi ekologi, kebocoran minyak menyebabkan lahan pertanian menghitam dan mengalami kerusakan. Tanah menjadi lengket, tanaman tidak bisa tumbuh, bahkan karet dan nanas mengalami kerusakan parah. Lahan yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan



warga kini tidak lagi produktif, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan keluarga mereka. Dalam situasi seperti ini, muncul keluhan, keresahan, dan rasa frustrasi yang tidak hanya berhenti pada ranah pribadi, melainkan berkembang menjadi bentuk perlawanan kolektif. Mengacu pada teori perlawanan James C. Scott, tindakan seperti mengeluh, mengumpulkan bukti pencemaran, serta melakukan protes merupakan bentuk everyday resistance atau perlawanan sehari-hari yang dilakukan secara senyap, sebagai respons atas dominasi kekuasaan yang menindas.

Seiring waktu, bentuk perlawanan warga berubah menjadi lebih terbuka. Mereka mulai menyatukan suara, mengorganisasi gerakan, dan melakukan aksi demonstrasi ke kantor pemerintah provinsi. Tuntutan mereka tidak hanya menekankan kompensasi atas kerugian, melainkan juga menuntut pemulihan lingkungan secara menyeluruh dan penjaminan keselamatan lingkungan di masa depan. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat telah bergerak dari bentuk perlawanan tersembunyi menjadi gerakan sosial yang terstruktur dan memiliki tujuan jelas.

Dalam konteks teori gerakan sosial, tindakan ini menunjukkan adanya transformasi kesadaran kolektif dari posisi sebagai korban menjadi agen perubahan. Ketika jalur formal, seperti laporan ke pemerintah desa atau dinas lingkungan hidup, tidak menghasilkan solusi konkret, maka warga memilih membentuk solidaritas untuk menuntut hak mereka secara langsung kepada pihak berwenang. Aksi demonstrasi yang dilakukan warga Kecamatan Belida Darat di kantor gubernur provinsi menunjukkan bahwa perlawanan bukan hanya hak, tetapi juga kebutuhan masyarakat ketika saluran keadilan tidak lagi berfungsi. Perlawanan ini juga menegaskan adanya ketimpangan kekuasaan antara masyarakat kecil dengan perusahaan besar, serta lemahnya pengawasan pemerintah yang semestinya hadir melindungi rakyatnya.

Tindakan dominasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan lambannya penanganan kerusakan lingkungan memicu lahirnya perlawanan kolektif dari warga. Mereka merasa tidak dapat lagi berdiam diri ketika kerugian yang dialami meliputi kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, hingga gangguan kesehatan. Dalam teori James C. Scott, situasi ini merupakan bentuk dari "overt resistance" atau perlawanan yang dilakukan secara terbuka di ruang publik, setelah sebelumnya hanya dilakukan secara tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, perlawanan warga Desa Talang Balai terhadap kebocoran minyak Pertamina bukan sekadar bentuk ekspresi ketidakpuasan, melainkan juga cermin dari perjuangan menuntut keadilan lingkungan dan hak atas kehidupan yang layak. Perlawanan ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa tertindas dan hak mereka terancam, maka solidaritas, gerakan sosial, dan aksi kolektif akan menjadi jalan untuk menuntut perubahan dan memastikan keadilan dapat ditegakkan.

## **B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Gerakan Masyarakat Terhadap Dampak Kebocoran Minyak Pertamina**

Gerakan masyarakat yang terjadi di kantor Gubernur Sumatera Selatan merupakan bentuk reaksi warga terhadap kerusakan lingkungan serta memburuknya kualitas hidup akibat kebocoran minyak dari aktivitas operasional Pertamina. Penduduk setempat yang mayoritas bergantung pada pertanian dan sumber daya alam harus menghadapi langsung dampak pencemaran tanah, air, hingga udara. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka, pergerakan ini tidak lepas dari sejumlah hambatan yang melemahkan efektivitas perjuangan mereka.



Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya keterbukaan informasi dari pihak perusahaan maupun instansi pemerintah. Warga tidak memperoleh penjelasan yang jelas dan detail mengenai seberapa besar pencemaran yang terjadi, langkah-langkah penanganan yang diambil, serta hak mereka sebagai korban dari bencana lingkungan tersebut. Situasi ini menimbulkan kebingungan di tingkat akar rumput dan menyulitkan masyarakat dalam menyusun langkah advokasi atau memilih jalur hukum secara tepat. Sejak pertama kali kejadian tersebut, warga mengaku tidak pernah diberi penjelasan pasti. Mereka hanya mendengar kabar dari mulut ke mulut bahwa pipa bocor dan sudah ditangani, namun mereka sendiri tidak pernah melihat langsung buktinya.

Warga merasa hanya mendapatkan potongan-potongan informasi yang tidak utuh tanpa adanya penjelasan resmi yang menyampaikan seberapa parah pencemaran tersebut, apa dampaknya terhadap kesehatan, atau langkah apa saja yang diambil oleh perusahaan maupun pemerintah. Kondisi ini membuat mereka kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa, apakah menuntut atau hanya menunggu dengan serba ketidakpastian. Tidak adanya informasi yang jelas memperburuk situasi mereka yang sudah terdampak secara ekonomi dan kesehatan. Sosialisasi mengenai hak-hak warga pun tidak pernah dilakukan secara terbuka, sehingga mereka tidak memiliki landasan untuk bertindak.

Dalam konteks teori perlawanan James C. Scott, keadaan ini termasuk dalam konsep *everyday forms of resistance*, yaitu ketika kelompok sosial lemah secara struktural tidak melakukan perlawanan frontal melainkan menyampaikan penolakan melalui tindakan kecil dan tersembunyi. Di Desa Talang Balai, warga mulai mendokumentasikan secara mandiri berbagai dampak pencemaran, seperti memotret air yang tercemar, mencatat keluhan kesehatan, dan menyusun data kerusakan lahan.

Komunikasi informal menjadi media utama dalam menyebarkan informasi antarwarga. Diamnya masyarakat bukan berarti kepasrahan, melainkan bentuk siasat bertahan hidup dalam situasi yang tidak berpihak. Ketika jalur formal tak memberikan kejelasan, warga mulai menyusun kekuatan melalui solidaritas sosial, pengalaman kolektif, dan dokumentasi pribadi yang mereka simpan. Sunyi mereka menjadi semacam bahasa perlawanan, dan konsistensi mereka menjadi simbol resistensi yang lahir dari kekecewaan mendalam. Meskipun tampak sederhana, berbagai langkah kecil tersebut merupakan ekspresi politik yang signifikan karena menunjukkan penolakan terhadap ketertutupan informasi dan penegasan hak atas keadilan lingkungan serta pengakuan sebagai warga negara.

Selain itu, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk menangani kasus pencemaran lingkungan menjadi hambatan besar lainnya. Aparatur desa atau kecamatan sering kali tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pemulihan lingkungan, menyediakan air bersih bagi warga terdampak, atau memberikan bantuan hukum. Hal ini membuat pemerintah kesulitan menjalankan perannya untuk melindungi masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang memadai, meskipun secara formal tanggung jawab tersebut berada di pundak mereka. Alokasi anggaran tahunan untuk sektor lingkungan di tingkat provinsi masih sangat terbatas dan hanya mencukupi kebutuhan dasar seperti kegiatan sosialisasi. Saat terjadi bencana lingkungan berskala besar, pemerintah daerah tidak memiliki cadangan dana khusus dan harus bergantung pada alokasi tambahan dari pemerintah pusat atau lembaga lain yang berwenang. Akibatnya, minimnya ketersediaan layanan dasar bagi warga terdampak seperti penyediaan air bersih, bantuan hukum, serta pemulihan lingkungan jangka panjang belum mampu memenuhi harapan masyarakat.



Kondisi ini memicu tekanan dan kekecewaan warga yang semakin besar. Pemerintah desa mengakui bahwa meskipun mereka sudah melaporkan peristiwa tersebut ke tingkat kecamatan dan kabupaten, respon yang diterima masih sangat lambat, sementara warga terus mengalami kerugian ekonomi dan kesehatan akibat lahan tercemar serta air yang tak layak pakai. Situasi ini mendorong munculnya gerakan masyarakat secara terbuka, dari yang semula hanya menyuarakan keluhan melalui jalur informal menjadi aksi kolektif. Mereka mendatangi kantor desa, menyampaikan tuntutan secara langsung, bahkan melakukan aksi ke kantor Gubernur Sumatera Selatan untuk menuntut keadilan lingkungan.

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori perlawanan James C. Scott, terutama pada fase di mana perlawanan yang semula tersembunyi (*hidden transcript*) berkembang menjadi perlawanan terbuka (*public transcript*). Ketika tekanan sosial dan politik sudah terlalu tinggi dan saluran formal tak mampu menyerap aspirasi masyarakat, maka warga cenderung melakukan aksi kolektif sebagai bentuk perlawanan nyata terhadap dominasi dan ketidakadilan. Gerakan masyarakat ini muncul bukan karena dorongan politik semata, melainkan lahir dari kondisi riil kerusakan lingkungan, ketimpangan informasi, serta lambannya tanggapan pemerintah dan perusahaan. Dengan demikian, meskipun pemerintah berkomitmen menindaklanjuti persoalan ini, keterbatasan kapasitas dan struktur birokrasi membuat warga merasa harus mengorganisir diri dan menyuarakan tuntutan secara langsung demi keberlanjutan hidup dan keadilan lingkungan yang mereka perjuangkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gerakan masyarakat Desa Talang Balai terhadap dampak kebocoran minyak Pertamina merupakan bentuk perlawanan yang lahir dari kondisi kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, serta ancaman kesehatan yang mereka alami. Pada tahap awal, perlawanan masyarakat diwujudkan dalam bentuk *everyday forms of resistance* sebagaimana dikemukakan oleh James C. Scott, yaitu melalui pendokumentasian mandiri dampak pencemaran, penyebaran informasi secara informal, dan pembentukan solidaritas kolektif. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan sosial dan kekecewaan atas lambannya penanganan dari perusahaan maupun pemerintah, bentuk perlawanan tersebut berkembang menjadi *public transcript* berupa aksi demonstrasi terbuka di kantor Gubernur Sumatera Selatan.

Gerakan ini menunjukkan adanya transformasi kesadaran kolektif dari posisi sebagai korban menjadi agen perubahan yang menuntut kompensasi atas kerugian ekonomi, pemulihan ekosistem, dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara. Hambatan utama yang dihadapi dalam gerakan ini adalah kurangnya keterbukaan informasi dari pihak perusahaan maupun pemerintah serta keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menangani dampak pencemaran lingkungan. Situasi tersebut memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan transparansi informasi, penyediaan anggaran pemulihan lingkungan yang memadai, serta penegakan regulasi lingkungan secara tegas untuk mewujudkan keadilan ekologis dan perlindungan hak masyarakat terdampak di Desa Talang Balai.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahib Situmorang. (2022). *Gerakan sosial :studikasusbeberaperlawanan*. <https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-Ia1000094214>



- Annisa, N. A., Vionica, P., & Kamal, U. (2024). *Analisis Dampak Lingkungan Wilayah Pesisir Akibat Tumpahan Oil Spill di Karawang*. 2(2), 3032–6591. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11261952>
- Attribution Non-Commercial (BY-NC). (2019, August 31). *Pertamina EP*. Atika Pusparani. <https://id.scribd.com/document/63621421/pertamina-EP>
- Bambang Tejokusumo. (2022). *56331-ID-dinamika-masyarakat-sebagai-sumber-belajar*. 39.
- Bapedda. (2020). *GAMBARAN UMUM SUMSEL*.
- BimaDwiPradibta. (2023). *EVALUASI SISTEM PENJUALAN BBM DAN OPERASI PENIMBUNAN, PEYALURAN BBM DI TERMINAL BBM BOYOLALI*. 1–35.
- DwiIrianiMargayaningsih. (2019). *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa*.
- Eko Prasetyo. (2024, October 2). *Warga Muara Enim Gugat Pertamina Rp10 Miliar Atas Kerusakan Ekologis dan Penghidupan*. Rmolsimsel. <https://www.rmolsumsel.id/warga-muara-enim-gugat-pertamina-rp10-miliar-atas-kerusakan-ekologis-dan-penghidupan#:~:text=Kebocoran%20pipa%20minyak%20Pertamina%20di%20kawasan%20Lembak,kini%20resmi%20menggugat%20Pertamina%20sebesar%20Rp10%20miliar>
- Fadila, N. I. (2024). *Pencemaran Laut dan Kejahatan Lingkungan akibat Tumpahan Minyak: Kajian Green Criminology dan Prisma Kejahatan*. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 8(1), 7. <https://doi.org/10.30595/jssh.v8i1.20007>
- Feri Kurniawan. (2024). *PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MEMBINA PERILAKU SOSIAL REMAJA DI DESA HANGTUAH KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR*.
- Lex Suprema, J., Anzward, B., Hukum Universitas Balikpapan JIPupuk Raya, F., Gn Bahagia, K., & Selatan, B. (2021). *Artikel PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. PERTAMINA AKIBAT KEBOCORAN PIPA DI TELUK BALIKPAPAN LEGAL RESPONSIBILITY OF PT. PERTAMINA DUE TO PIPE LEAKAGE IN TELUK BALIKPAPAN*. <https://fokus.tempo.co/read/1077168/dampak->
- Mulyanto. (2022). *PROFIL DESA TALANG BALAI*.
- Rahmayanti, L., Rahmah, D. M., & Larashati, D. (2021). *ANALISIS PEMANFAATAN SUMBER DAYA ENERGI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA*. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 3(2), 9–16.
- Rusdiyanta, R. (2020). *Peran Negara Menghadapi Globalisasi*. <https://www.researchgate.net/publication/328900753>
- Seymour Martin Lipset. (2020). *Political Man: The Social Bases of Politics* (4th ed.). Johns Hopkins University Press, 1981. [https://books.google.co.id/books/about/Political\\_Man.html?id=Gv-CAAAAMAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Political_Man.html?id=Gv-CAAAAMAAJ&redir_esc=y)
- Sri Amelia. (2022). *Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan Menimbulkan Permasalahan*.
- TiantiTridewi. (2021). *LAPORAN TUGAS AKHIR PROSEDUR PENERIMAAN BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM ) DI PERTAMINA ( PERSERO ) FUEL TERMINAL JAMBI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*.
- Yohana Damai Jayati, H. M. N. I. (2019). *ANALISIS PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK INDUSTRI DI PT. PERTAMINA ( PERSERO ) CABANG BANDUNG*.